

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kriminalitas

1.1 Definisi Kejahatan atau Kriminalitas

Secara sosiologi kejahatan merupakan segala perilaku manusia yang menimbulkan kerugian materi, psikologis dan mengganggu kehidupan bersama. Kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, kejahatan harus diperangi sebagaimana menurut ilmu hukum karena karena kejahatan menyebabkan kerugian (Sosilo dalam Maulana, 2014).

Menurut Kartono dalam Arsono (2014) menyebutkan bahwa kejahatan secara yuridis merupakan perilaku manusia yang menyimpang, merugikan dan bersifat asosiatif. Menurut pandangan dari ilmu kriminologi kejahatan dianggap sebagai suatu perilaku yang mencederai moral dasar manusia seperti penghargaan terhadap properti dan perlindungan terhadap penderitaan orang lain. Meskipun begitu, moral dasar ini dapat berbeda berdasarkan waktu dan komunitas (Adler, Mueller, dan Laufer dalam Arsono, 2014).

Ilmu ekonomi sendiri memandang kejahatan merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ketidakefisienan alokasi sumberdaya dan mendistorsi harga sehingga jumlahnya harus ditekan. Ilmu ekonomi menggunakan kerangka yang dimiliki dalam mengoptimalkan alokasi penggunaan sumber daya untuk menekan angka kejahatan ke tingkat yang serendah-rendahnya.

Hipotesis Becker (1974) bahwa kejahatan merupakan tindakan rasional dengan memperhitungkan untung rugi yang didapatkan dari melakukan tindakan illegal tersebut. Tidak jauh berbeda dengan model yang dijelaskan Becker, rasionalitas kejahatan menurut Sullivan (2003) yaitu ada tiga alasan seseorang melakukan kejahatan, pertama karena ia sangat pandai sehingga sulit untuk tertangkap sedangkan keuntungan yang didapat sangat menguntungkan. Kedua karena opportunity cost yang didapatkan sangat rendah sehingga melakukan kejahatan lebih menguntungkan. Ketiga karena pelaku tidak memiliki rasa hormat terhadap norma yang berlaku sehingga menganggap kejahatan merupakan tindakan yang legal.

1.2 Penawaran dan Permintaan Kejahatan

Menurut Becci (1999) keseimbangan kejahatan terbentuk dari penawaran dan permintaan kejahatan. Penawaran kejahatan diperoleh dari pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan sedangkan dari sisi permintaan didapat dari permintaan masyarakat akan keamanan. Permintaan keamanan dilakukan dengan cara seperti menyewa penjaga

dan sebagainya. Pemerintah dalam keseimbangan kejahatan dapat mempengaruhi kedua sisi baik dari penawaran maupun permintaan.

Penawaran kejahatan terjadi akibat pilihan untuk melakukan kegiatan ilegal atau bekerja atau memilih untuk melakukan tindakan ilegal. Pilihan tersebut tergantung dari imbalan kejahatan yang diterima. Imbalan tersebut harus lebih besar dari keseluruhan biaya yang digunakan. Biaya tersebut termasuk hilangnya kesempatan untuk bekerja secara legal, biaya dalam melakukan kejahatan serta ekspektasi hukuman yang akan diterima. Ehrlich (1996) mengungkapkan bahwa faktor-faktor penawaran kejahatan antara lain; ekspektasi harta rampasan, biaya langsung dalam memperoleh harta rampasan, upah rata-rata di pasar kerja yang legal, peluang ditangkap, dan selera tiap individu dalam melakukan kejahatan.

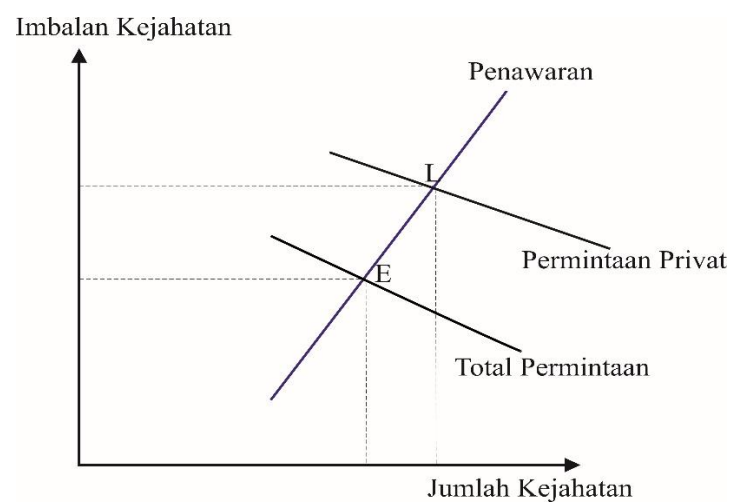
Faktor faktor yang dapat menyebabkan bergesernya kurva penawaran adalah faktor demografi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan perubahan kebijakan pemenjaraan. Pendidikan dan kesejahteraan juga dapat meningkatkan *opportunity cost* dalam melakukan tindak kejahatan dengan menaikkan pendapatan yang legal (Becsi, 1999).

Permintaan kejahatan merupakan permintaan akan keamanan bagi setiap masyarakat yang takut akan terkena tindak kejahatan karena adanya hubungan negatif. Hubungan negatif timbul karena tindak kejahatan akan meningkatkan perlindungan terhadap diri sehingga

setiap orang akan menambah biaya untuk mendapatkan perlindungan tersebut sehingga meningkatkan biaya *opportunity* bagi setiap kejahatan.

Komponen lain yang memengaruhi keseimbangan kejahatan adalah pemerintah. Usaha pemerintah untuk mengurangi jumlah kejahatan berdampak pada kurva permintaan. Permintaan publik terhadap kejahatan (perlindungan kejahatan) memiliki slope negatif, karena permintaan kejahatan tinggi maka biaya *opportunity* kejahatan akan naik sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah kejahatan yang terjadi.

Gambar 2. 1 *Permintaan dan Penawaran Kejahatan*



Sumber : *Becsi, 1999*

Keseimbangan kejahatan terjadi pada titik E dimana akibat adanya pergeseran dari titik L. Pengaruh dari luar akan mempengaruhi keseimbangan baik dari sisi permintaan ataupun penawaran. Pengaruh tersebut ditentukan oleh elastisitas kurva permintaan dan penawaran.

Kurva total permintaan adalah penjumlahan dari permintaan privat/individu dan permintaan publik. Kurva permintaan total berada dibawah kurva permintaan privat dikarenakan kombinasi dari usaha publik dan privat dalam mencegah tindak kejahatan.

1.3 Pengertian Tindak Kejahatan Pencurian

Kata Pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan akhiran-an. Menurut Poerwardarminta dalam Ramadani (2012):

“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”

Pencurian di dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa.

2. Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.
3. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.
4. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHPidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia.

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya laporan yang masuk dalam tindak pidana pencurian yang dilaporkan kepada polisi.

2. Pendidikan

Menurut Todaro (2004) bahwa permintaan akan pendidikan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang bagi siswa itu sendiri maupun keluarganya serta biaya-biaya pendidikan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan/ keluarganya. Sedangkan dari sisi penawaran, jumlah sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan universitas lebih banyak ditemukan oleh proses politik, yang seringnya tidak berkaitan dengan kriteria ekonomi.

Proses pendidikan akan melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai bekal untuk berperan dan berinteraksi dalam masyarakat. Kemampuan dasar yang diperoleh dalam proses belajar adalah kemampuan baca-tulis. Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan baca-tulis penduduk adalah angka melek huruf. Angka melek huruf dihitung dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis terhadap seluruh penduduk berusia 15 tahun. (BPS Prov. DIY)

Melek huruf memungkinkan manusia melakukan lompatan kuantum dalam kehidupan peradaban karena dengan melek huruf masyarakat memiliki daya akses yang luas terhadap informasi. Lompatan itu dapat dilakukan karena sumber informasi merupakan sumber kekuatan. Angka melek huruf dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AMH_{15}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100 \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

MH_{15+}^t : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis pada tahun ke t

P_{15+}^t : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada tahun ke t

Angka melek huruf bernilai antara 0-100, dimana angka yang tinggi atau mendekati 100 berarti menunjukkan adanya pendidikan dasar yang baik atau program keaksaraan yang bisa diperoleh oleh masyarakat sehingga memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari.

Melek huruf dianggap penting karena merupakan awal dari pembelajaran yang berkelanjutan dari seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya dengan memanfaatkan informasi yang diterimanya. Informasi tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan yang diperlukan sehingga seseorang dapat menggali potensinya.

Menurut Amalia dalam Arsono (2014) pada dasarnya pendidikan merupakan hal pokok yang paling penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan pendidikan yang tinggi diharapkan dapat memiliki keterampilan yang baik sehingga menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

2.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kejahatan

Penelitian yang dilakukan oleh Lochner (2007) ada hubungan negatif antara tingkat pendidikan dan tingkat kejahatan. Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang legal. Pendidikan yang tinggi pula cenderung akan berpengaruh pada tindak criminal karena manfaat yang kecil, sehingga kenaikan upah dapat mempengaruhi jumlah tindak criminal yang ada.

Lochner (2007) berpendapat juga bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang cenderung akan meningkatkan kualitas keterampilan yang dimiliki. Keterampilan yang dimiliki lulusan SD akan berbeda dengan lulusan SMP, SMA dan juga tingkat universitas. Waktu luang yang dimiliki oleh lulusan SD, SMP, SMA dan universitas akan berbeda. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka waktu luang yang dimiliki akan semakin banyak. Ketersediaan waktu luang yang berlebih dapat memicu timbulnya tindak kejahatan.

Analisis yang dilakukan oleh Ehrlich (1996) yaitu pendidikan merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, karena dengan pendidikan yang tinggi seseorang akan memperhitungkan resiko apabila melakukan suatu tindak kejahatan. Dengan alasan tersebut pendidikan akan mampu menekan angka tindak kejahatan.

3. Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis (Mankew, 2007). Pengangguran menurut Sukirno (2001) adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Kenaikan produksi yang dilakukan oleh para pengusaha karena tingginya permintaan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, semakin tingginya pendapatan nasional, semakin banyak pula tenaga kerja dalam perekonomian. Faktor lain yang menimbulkan (i) pengangguran antara lain karena penganggur ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, (ii) pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, (iii) ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri.

Menurut sebab terjadinya, pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis (Sukirno, 2001) :

a. Pengangguran friksional atau pengangguran normal

Ketika perekonomian terus tumbuh dan mengalami perkembangan yang pesat maka jumlah dan tingkat pengangguran akan menjadi semakin rendah. Pada akhirnya

perekonomian akan mampu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh yakni di bawah 4% dan pengangguran yang berlaku dinamakan pengangguran friksional atau pengangguran normal. Pengangguran ini bukanlah wujud dari ketidakmampuan mendapat pekerjaan, tetapi sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik.

Apabila perekonomian semakin membaik dan tingkat pengangguran semakin rendah, maka para pengusaha tentunya akan semakin kesulitan untuk melakukan penyerapan tenaga kerja guna meningkatkan produksi mereka. Keadaan seperti ini akan memicu para pekerja untuk menuntut gaji mereka. Selain itu, akan didapati pula keadaan dimana segolongan tenaga kerja mulai meninggalkan pekerjaan lama mereka dan mencari pekerjaan baru yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja tersebut mereka tentu akan menganggur sementara, dan sifat menganggur ini tidak serius.

b. Pengangguran struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian dan kegiatan perekonomian sebagai akibat dari perkembangan ekonomi. Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya pengangguran struktural yaitu, (i) akibat dari kemerosotan permintaan, dan (ii) sebagai akibat dari semakin

canggihnya teknik memproduksi. Pengangguran yang diakibatkan oleh faktor ke dua atau karena kemajuan teknologi yang digunakan pengusaha akan menimbulkan pengangguran teknologi.

c. Pengangguran konjungtur

Pengangguran konjungtur merupakan pengangguran yang timbul oleh perubahan-perubahan kegiatan perekonomian. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, maka pengusaha akan mengurangi penggunaan mesin produksi dan tenaga kerja yang digunakan. Sehingga kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran. Tenaga kerja yang terus bertambah sebagai akibat dari pertambahan penduduk dengan tidak diikuti perkembangan perekonomian yang semakin membaik, maka pengangguran konjungtur akan bertambah serius.

Untuk mengatasi pengangguran ini bukan hanya menunggu perkembangan perekonomian yang membaik tetapi juga dengan menyediakan kesempatan kerja untuk tenaga kerja baru yang memasuki pasar tenaga kerja. Pengangguran konjungtur hanya dapat diatasi masalahnya apabila pertumbuhan ekonomi yang berlaku setelah kemunduran ekonomi adalah cukup teguh dan dapat menyediakan kesempatan kerja baru yang lebih besar dari pertambahan tenaga kerja yang berlaku.

Pengangguran juga menimbulkan akibat buruk dan dibedakan menjadi dua aspek :

a. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tujuan setiap negara adalah memaksimalkan kemakmuran masyarakatnya dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan yang teguh. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Dapat kita lihat akibat-akibat buruk yang ditimbulkan pengangguran terhadap kegiatan perekonomian.

Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Karena pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah dari pendapatan nasional potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai lebih rendah dari tingkat yang mungkin dicapainya.

Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Sebagai akibat dari tingkat perekonomian yang rendah juga akan menimbulkan dampak terhadap pendapatan pajak pemerintah yang juga ikut rendah. Dengan demikian pengangguran akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan kegiatan pembangunan.

Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pengangguran menimbulkan dampak yang buruk terhadap sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga buruh akan diikuti oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan kelesuan perusahaan akan mengurangi keuntungan yang didapat oleh pengusaha. Menurunnya keuntungan akan mengurangi keinginan pengusaha untuk berinvestasi. Dan kedua hal tersebut tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

b. Akibat buruk terhadap individu dan masyarakat

Beberapa keburukan yang ditimbulkan oleh pengangguran terhadap individu dan masyarakat di sekitarnya antara lain : pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Berbeda dengan negara maju, dimana para pengangguran di sana tetap diberikan asuransi untuk melanjutkan kehidupannya. Sedangkan di negara berkembang, mereka harus membiayai kehidupan selanjutnya dan bergantung pada tabungan masa lalu atau pinjaman.

Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Karena keterampilan akan tetap hidup bila terus dipraktikkan atau digunakan. Sehingga pengangguran dalam periode yang sangat lama akan menyebabkan tingkat keterampilan pekerja semakin merosot.

Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan perekonomian yang lesu dan pengangguran yang tinggi akan mengikis rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah, dan adakalanya akan diikuti oleh demonstrasi dan huru-hara. Kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal (pencurian dan perampokan) juga akan meningkat.

3.1 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kejahatan

Levitt dalam Arsono (2014) mendapatkan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kejahatan properti termasuk kejahatan pencurian bahkan setelah ia masukan variabel *dummy* ke dalam analisisnya. Ia juga menemukan adanya hubungan negatif antara kejahatan kekerasan dengan pengangguran. Dengan menggunakan *time series data state*, ia menemukan pengaruh signifikan antara pengangguran dan kejahatan properti untuk kategori remaja ataupun dewasa, tetapi mendapati hubungan yang tidak signifikan antara pengangguran dan kejahatan kekerasan.

4. Indikator Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan ini umumnya merupakan salah satu inti permasalahan dalam negara-negara berkembang. Distribusi pendapatan perseorangan sendiri merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga (Todaro & Smith, 2004). Pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan akan semakin tinggi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks gini, kriteria Bank Dunia, dan Kurva Lorenz.

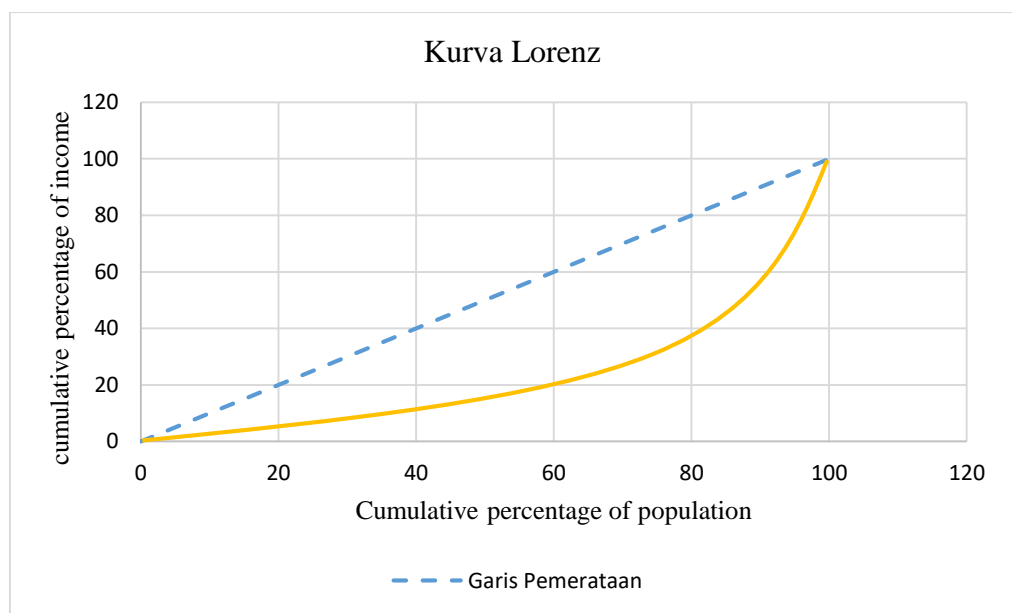
Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas Kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan atau rasio antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Secara Matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan persamaan berikut :

$$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10000} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan : P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i
 Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas ke-i
 k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

Penghitungan dengan menggunakan indeks gini memiliki rasio antara 0 dan 1. Bila indeks gini sama dengan 0 berarti terjadi distribusi pendapatan yang sempurna merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Akan tetapi, apabila indeks gini sama dengan 1 maka terjadi ketimpangan distribusi pendapatan sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja.

Gambar 2. 2 Kurva Lorenz



Sumber : Todaro, 2006

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduknya secara kumulatif dan diperkenalkan pertama kali oleh Max Otto Lorenz di

tahun 1905 (Setiawan, 2011). Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Sisi vertikalnya menggambarkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi horisontalnya menggambarkan persentase kumulatif populasi.

4.1 Pengaruh Kesenjangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kejahatan

Teori Becker menjelaskan bahwa tingkat kesenjangan antara orang dengan pendapatan rendah dari sector legal dibandingkan dengan orang yang berharta tinggi dalam suatu daerah. Hal tersebut akan mengakibatkan aksi kejahatan akan naik di daerah tersebut akibat adanya *return* dari aksi kejahatan. Sedangkan teori Strain berpendapat bahwa perasaan frustrasi akan menghinggapi orang-orang yang tidak sukses ketika berhadapan dengan orang-orang sukses di sekitarnya. Semakin besar kesenjangannya, akan semakin besar rasa frustrasi tersebut sehingga akan memperbesar godaan untuk melakukan tingkat kejahatan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu. Beberapa acuan yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Alison Oliver (2002), Lance Lochner (2007), Ihdal Husnayain (2007), Z. Becsi (1999) dan Tresna Maulana (2014).

1. Penelitian Zsolt Becsi (1999) yang berjudul “Economics And Crime in The States”. Menggunakan variabel independen penduduk berusia 15-19 tahun dan 20-24 tahun, variabel pengangguran, pendapatan seseorang, pendidikan, tahanan, pengeluaran polisi dan jumlah polisis dengan variabel dependen adalah tingkat kejahatan. Diperoleh hasil bahwa variabel pengangguran dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan di Amerika. Variabel lain seperti usia berpengaruh signifikan, kepadatan penduduk berpengaruh tidak signifikan begitu juga dengan variabel pendidikan, variabel kesejahteraan berpengaruh signifikan, narapidana berpengaruh signifikan, kemudian variabel pencegah seperti jumlah polisi dan pengeluaran kepolisian semuanya berpengaruh signifikan.
2. Penelitian Alison Oliver (2002) yang berjudul “The Economics of Crime: An Analysis of Crime Rates in America” menunjukkan hasil bahwa variabel independen yaitu jumlah siswa yang mampu menyelesaikan sekolah menengah, jumlah siswa yang terdaftar pada sekolah menengah, jumlah GDP perkapita, indeks gini, dan tingkat pengangguran, serta variabel demografi yaitu persentase populasi yang berumur di bawah 25 tahun dan banyaknya polisi/angka polisi perkapita, penduduk yang dipenjara, selisih

kejahatan perkapita dengan variabel dependen tingkat kriminalitas hampir semuanya berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas sedangkan pengangguran menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

3. Penelitian Lance Lochner (2007) dengan judul “Education and Crime” menggunakan variabel independen yaitu pendidikan dan dependen tingkat kriminalitas. Secara empiris tingkat pendidikan yang meningkat dapat menurunkan tindak kejahatan property secara signifikan.
4. Penelitian Ihdal Husnayain (2007) dengan judul “Analisis Ekonomi Kejahatan di Indonesia Tahun 2005” didapat hasil bahwa variabel bebas pendapatan yang menggunakan data upah provinsi, pengangguran, proporsi pria usia 15 – 29 tahun dalam populasi, dan tingkat penyelesaian kasus oleh polisi berpengaruh signifikan, sedangkan kekuatan polisi dan koefisien gini tidak berpengaruh signifikan terhadap kejahatan property di Indonesia.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Tresna Maulana (2014) dengan judul “Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Dengan Pendekatan Ekonomi (Studi Kasus Narapidana Di LP Klas I Kedungpane Kota Semarang)” dapat diambil kesimpulan bahwa Variabel Umur berpengaruh negative dan tidak signifikan, variabel pendidikan berpengaruh negative dan signifikan, variabel pendapatan berpengaruh negative dan signifikan dan variabel jumlah tanggungan keluarga mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Semarang studi kasus narapidana di LP klas I Kedungpane Kota Semarang

Beberapa acuan utama penelitian terdahulu di atas kemudian peneliti sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti, Tahun dan Judul | Variabel | Metode Analisis | Hasil Analisis |
|-----|---|--|-----------------|---|
| 1 | Zsolt Becsi (1999) <i>Economics and Crime in the States</i> | Variabel Dependen : Tingkat kejahatan Variabel Independen : Kepadatan penduduk; usia 15–19 tahun; usia 20 –24 tahun; pengangguran; pendapatan seseorang; pendidikan; tahanan; pengeluaran polisi; jumlah polisi | Regresi Panel | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel kepadatan penduduk berhubungan positif dan tidak signifikan • Variabel usia berhubungan positif dan signifikan • Variabel pengangguran berhubungan positif dan signifikan • Variabel pendapatan personal berhubungan positif dan signifikan • Variabel kesejahteraan berhubungan negatif dan tidak signifikan • Variabel pendidikan berhubungan positif dan tidak signifikan • Variabel narapidana berhubungan negatif dan signifikan • Variabel pengeluaran polisi berhubungan positif dan signifikan • Variabel personil kepolisian berhubungan positif dan signifikan |
| 2 | Alison Oliver (2002) <i>The Economics of Crime: An Analysis of</i> | Variabel Dependen : Tingkat Kejahatan Variabel Independen : | OLS | <ul style="list-style-type: none"> • Regresi I : (Variabel Ekonomi) <ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah lulusan sekolah menengah |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
| | <i>Crime Rates in America</i> | Variabel Ekonomi; Variabel Pencegah; Variabel Demografi | <p>memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah yang terdaftar sekolah menengah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan ○ GDP perkapita memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan ○ Indeks Gini memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan ○ Pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan <p>: (Variabel Pencegah)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah polisi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan ○ Jumlah tahanan memiliki pengaruh negatif dan signifikan ○ Lag Crime memiliki pengaruh positif dan signifikan <p>: (Variabel Demografi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Usia dibawah 25 tahun memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan <ul style="list-style-type: none"> ● Regresi II : (variabel demografi) <ul style="list-style-type: none"> ○ Usia dibawah 25 tahun memiliki pengaruh positif dan signifikan |
|--|-------------------------------|---|--|

| | | | | |
|---|---|--|---------------|--|
| | | | | <p>: (Variabel Pencegah)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah polisi memiliki pengaruh negatif dan signifikan <p>: (Variabel Ekonomi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan |
| 3 | Lance Lochner (2007) <i>Education and Crime</i> | Var. Dependen : Tingkat Kejahatan Var. Independen : Pendidikan | OLS | Secara Empiris, meningkatnya tingkat pendidikan dapat menurunkan tindak kekerasan dan kejahatan properti secara signifikan |
| 4 | Ihdal Husnayain (2007) Analisis Ekonomi Kejahatan Properti di Indonesia Tahun 2005 | Variabel Dependen : Kejahatan Properti Variabel Independen : Pendapatan; pengangguran; proporsi usia 15-29 tahun; tingkat penyelesaian kasus oleh polisi (PAP); koefisien gini; kekuatan kepolisian | Ordered Logit | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan • Variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan • Variabel proporsi usia 15-29 tahun memiliki pengaruh positif dan signifikan • Variabel tingkat penyelesaian kasus memiliki pengaruh positif dan signifikan • Variabel kekuatan kepolisian tidak berpengaruh terhadap tingkat kejahatan • Variabel koefisien gini tidak berpengaruh terhadap tingkat kejahatan |
| 5 | Tresna Maulana (2014) Pengaruh | Var. Dependen : Tingkat | Double-log | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Umur berpengaruh negative dan tidak signifikan |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>Umur, Pendidikan, Pendapatan, dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Dengan Pendekatan Ekonomi (Studi Kasus Narapidana Di LP Klas I Kedungpane Kota Semarang)</p> | <p>Kejahatan Pencurian Var. Independen : Umur, Pendidikan, Pendapatan, dan Jumlah Tanggungan Keluarga</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Variabel pendidikan berpengaruh negative dan signifikan • Variabel pendapatan berpengaruh negative dan signifikan • Variabel jumlah tanggungan keluarga mempunyai hubungan positif dan signifikan |
|--|---|---|---|

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau simpulan yang diambil berdasarkan teori dalam kajian pustaka (Martono, 2011). Dalam penelitian ini peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Perubahan indikator pada variabel tingkat pengangguran diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Perubahan indikator pada variabel tingkat pendidikan diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan pencurian yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Perubahan indikator distribusi ketimpangan pendapatan atau rasio gini diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Model Penelitian

Rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh oleh penduduk mengakibatkan rendahnya keterampilan yang didapat. Sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat dijangkau semakin terbatas. Penduduk yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja lebih banyak memiliki waktu luang, sehingga lebih besar kemungkinannya untuk melakukan tindak kriminal. Tindak kriminal yang umumnya dilakukan untuk mendapatkan uang secara cepat adalah dengan melakukan aksi pencurian

Keterbatasan pekerjaan yang dapat diperoleh menyebabkan kemungkinan besar penduduk menganggur. Penduduk yang menganggur berarti sulit untuk dapat mendapatkan alat pemuas kebutuhan seperti uang sehingga sulit untuk dapat hidup dengan layak yaitu dapat memenuhi kebutuhannya secara layak. Sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan memaksa seseorang untuk cenderung melakukan tindak kriminal sehingga kebutuhan tadi dapat terpenuhi salah satunya dengan pencurian.

Ketimpangan distribusi pendapatan antara penduduk pendapatan rendah dengan penduduk berpendapatan tinggi menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial. Penduduk dengan pendapatan rendah akan mencoba untuk melakukan cara agar mereka dapat hidup seperti penduduk dengan pendapatan tinggi. Hal itu memungkinkan mereka melakukan tindakan ilegal guna memenuhi kebutuhannya.

Berdasar uraian di atas, maka peneliti membagi variabel yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tiga yaitu variabel tingkat pendidikan, variabel tingkat pengangguran dan variabel rasio gini. Berdasarkan uraian tersebut kerangka pemikiran penelitian disajikan dalam gambar 2.3.

Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

